

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, 2010, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta;
- Amiruddin dan Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press;
- Attamimi, A. H. S., *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992, Hlm. 8. Dalam buku Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press;
- Budiono, Abdul R, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, Halaman xiii;
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius;
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni;
- Husni, Lalu, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta;
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung;
- Nawawi, Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press
Siagian, Sondang P., 2000, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta;

Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Simanjuntak, Payman J., 2003, *Undang-Undang Yang Baru Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional. (dalam penelitian hukum yang disusun oleh Ika Adi Permana, 2008, dengan Judul “Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap Praktek Outsourcing di Surakarta”, Universitas Sebelas Maret Surakarta).

Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press;

_____, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press;

_____ dan Sri Mamudji, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;

Sujamto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika;

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta;

Tjandra, Surya dan Suryomenggolo, 2002, *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*, Jakarta, TURC, Hlm. 89-90, yang dikutip dalam buku Aloysius Uwiyono, Siti hajati Hosein, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, Sutrisno Hadi, 1993, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offset.

Triyanto, Djoko, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung, Mandar Maju.

Uwiyono Aloysius, Hoesein, dan Suryandoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Depok, PT Rajagrafindo Persada.

Wahyudi Eko, Yulianingsih, dan Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1951 Nomor 4;

Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201;

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No 81 *Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82;

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Karya Ilmiah/ Jurnal/ Naskah Publikasi

Danumulyo, Ririn Irawaty, 2015, *Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita Di Tempat Hiburan Malam Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Tesis), Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rochania, Iin, 2013, *Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Perusahaan Sarung Tangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kartikasari, Yuni, 2015, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perlindungan Pekerja Outsorcing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Lain-Lain

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi VIII (Ketujuh), [https://www.bappenas.go.id/files/1914/5311/2449/Paket kebijakan ekonomi jilid 7.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1914/5311/2449/Paket_kebijakan_ekonomi_jilid_7.pdf). Diakses pada tanggal 1 November 2017;

Hukum Online, Senin, 28 April 2008, Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung>, diakses pada Senin, Tanggal 12 Februari 2018, Pukul 23.00;

Artikel : Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2016, 26 September 2016, <http://kemnaker.go.id/berita/binwasnaker-k3/rakornas-pengawasan-ketenagakerjaan-tahun-2016>, diakses Pada Tanggal 14 Februari 2018, Pukul 23.00;

Artikel, Menaker: Perkuat Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Daerah, <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/menaker-perkuat-peranan-pengawas-ketenagakerjaan-daerah>, diakses pada Tanggal 14 Februari 2018, Pukul 08.00.

LAMPIRAN